



**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL,
KESESUAIAN KOMPENSASI, DAN MORALITAS
INDIVIDU TERHADAP KECENDERUNGAN
KECURANGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DESA
SE KECAMATAN ADIWERNA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

**Indriyani Husen
NIM 7101415218**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *25 Maret 2019*

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi


Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.
NIP. 198201302009121005

Pembimbing


Drs. Subowo, M.Si.
NIP. 195504161984031003

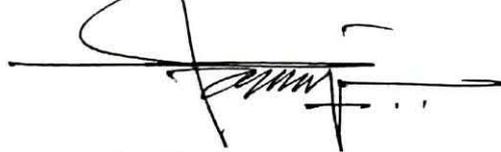
PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *15 April 2019*

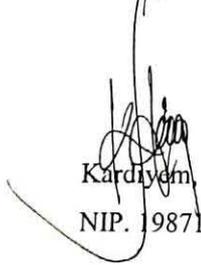
Penguji I



Drs. Tarsis Tarmudji, M.M.

NIP. 194911212017021226

Penguji II



Kardiyem, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198712282015042001

Penguji III

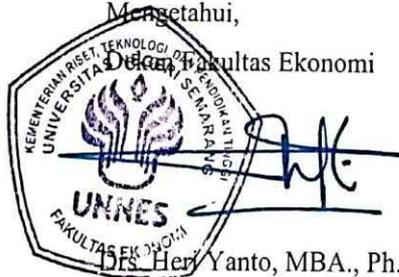


Drs. Subowo, M.Si.

NIP. 195504161984031003

Mengetahui,

Dekan, Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D.

NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriyani Husen

NIM : 7101415218

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 28 Februari 1997

Alamat : Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya.

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 25 Maret 2019



Indriyani Husen

NIM. 7101415218

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- Kejujuran adalah kekayaan paling jarang yang dimiliki manusia (Josh Billing)
- Kita hidup untuk saat ini, kita bermimpi untuk masa depan, dan kita belajar untuk kebenaran abadi (Chiang Kai-shek)

Persembahan

- Teruntuk Bapak Muksin dan Ibu Bunda Lestari serta keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat.
- Teruntuk Bude Sri Hidayati yang selalu memberi motivasi.
- Almamater Unnes.

PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Se Kecamatan Adiwerna”** dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis sadar banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Besarnya semangat dan kegigihan yang penulis lakukan serta dorongan, arahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
4. Drs. Subowo, M.Si., Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini hingga akhir.

5. Drs. Tarsis Tarmudji, M.M., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan pengarahan agar skripsi menjadi lebih baik.
6. Kardiyem, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan pengarahan agar skripsi menjadi lebih baik.
7. Drs. Kusmuriyanto, M.Si., Dosen Wali Rombel Pendidikan Ekonomi Akuntansi B tahun 2015 Program Strata 1 (S1) Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan doa.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengampu dan membekali ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang serta karyawan FE yang telah memberikan dukungannya.
9. Seluruh perangkat desa se Kecamatan Adiwerna yang telah memberikan ijin penelitian
10. Teman-teman Pendidikan Akuntansi B angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan segala nikmat dan rahmat-Nya kepada semua pihak atas kebaikannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 15 April 2019

Penulis

SARI

Husen, Indriyani. 2019. “Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Desa Se Kecamatan Adiwerna”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Drs. Subowo, M.Si. 240 halaman.

Kata Kunci : Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Kecenderungan kecenderungan Akuntansi.

Kecurangan Akuntansi dewasa ini telah menjadi hal yang merajalela mulai dari sektor swasta hingga sektor publik seperti pemerintah. Mulai tingkatan tertinggi hingga tingkatan terendah pemerintah yaitu pemerintah desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perangkat desa se Kecamatan Adiwerna. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 96. Sampel dalam penelitian ini meliputi kepala desa dan PTPKD (Pelaksanaan Teknik Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari: sekertaris desa, bendahara desa, dan kepala seksi (terdiri dari 3 bidang yaitu: bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pemerintahan, dan bidang pelayanan) se Kecamatan Adiwerna. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu secara simultan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu secara parsial berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Saran dalam penelitian ini, bagi perangkat desa se Kecamatan Adiwerna hendaknya bisa lebih meningkatkan pengendalian internal baik secara *top down* (atas ke bawah) maupun *bottom up* (bawah ke atas). Pemerintah desa juga hendaknya lebih meningkatkan efisiensi pembayaran upah dan gaji agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Perangkat desa juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moralitas individu dengan menjunjung nilai kejujuran dalam bekerja serta melaporkan setiap tindak kecurangan maupun indikasi kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah desa.

ABSTACT

Husen, Indriyani. 2019. "The Effect of Internal Control, Compensation Suitability, and Individual Morality on Tendency of Accounting Fraud in the Village Government of Adiwerna District". Final Project. Accounting Education Departement. Faculty of Economics. Semarang State University.
Advisor: Drs. Subowo, M.Si. 240 pages.

Keywords: Internal Control, Compliance Compensation, Individual Morality, Accounting Trend Tendency.

Accounting fraud today has become rampant from the private sector to the public sector such as the government, from the highest level to the lowest level of government, the village government. The purpose of this study is to determine the effect of internal control, suitability of compensation, and individual morality on the tendency of accounting fraud in the village government in Adiwerna District.

The population of this study is all village apparatus in the Adiwerna District. This study uses judgment sampling technique with a total of 96 respondents. The sample in this study included the village head and PTPKD (Implementation of Village Financial Management Techniques) consisting of: village secretary, village treasurer, and head of section (consisting of 3 fields namely: the field of community welfare, the field of government, and the field of service) in the District of Adiwerna. The method of data collection in this study is the questionnaire method. The data analysis method used is descriptive analysis and multiple linear regression analysis.

The results of this study indicate that internal control, compensation suitability, and individual morality simultaneously have a negative effect on the tendency of accounting fraud. The results of this study also indicate that internal control, compensation suitability, and individual morality partialy have a negative effect on the tendency of accounting fraud.

Suggestions in this study, for village apparatus in Adiwerna District should improve internal control both top down and bottom up. The village government should also increase the efficiency of wages and salaries payment so there are no delays in payments. Village apparatus are also expected to be able to increase the awareness of their individual morality by upholding honesty value in work and reporting any indication of fraud that occur in village government.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iiiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
ABSTACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Cakupan Masalah	14
1.4. Rumusan masalah.....	14
1.5. Tujuan Penelitian.....	15
1.6. Kegunaan Penelitian.....	16
1.7. Orisinalitas Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Kajian Teori Utama (<i>Grand Theory</i>)	19
2.1.1. Teori Atribusi	19
2.1.2. Teori <i>Fraud Triangle</i>	20
2.2. Kajian Variabel Penelitian	23
2.2.1. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	23
2.2.2. Pengendalian Internal	29
2.2.3. Kesesuaian Kompensasi	37

2.2.4.	Moralitas Individu	43
2.3.	Kajian Penelitian Terdahulu.....	47
2.4.	Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian	54
2.4.1.	Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	54
2.4.2.	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	57
2.4.3.	Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	58
2.4.4.	Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	60
BAB III	METODE PENELITIAN.....	63
3.1.	Jenis dan Desain Penelitian	63
3.2.	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	63
3.3.	Variabel Penelitian	65
3.3.1.	Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	65
3.3.2.	Pengendalian Internal	66
3.3.3.	Kesesuaian Kompensasi	66
3.3.4.	Moralitas Individu	66
3.4.	Metode Pengambilan Data	67
3.5.	Uji Instrumen Penelitian.....	69
3.5.1.	Uji Validitas	69
3.5.2.	Uji Realibilitas.....	73
3.6.	Metode Analisis Data	75
3.6.1.	Analisis Data Deskriptif	75
3.6.2.	Analisis Regresi Berganda	78
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik	80
3.6.4.	Pengujian Hipotesis.....	81
3.6.5.	Koefisien Determinasi.....	82
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	83
4.1.	Hasil Penelitian	83

4.1.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	83
4.1.2.	Hasil Pengumpulan Data.....	83
4.1.3.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	85
4.1.4.	Hasil Analisis Regresi Berganda.....	96
4.1.5.	Uji Asumsi Klasik.....	101
4.1.6.	Hasil Pengujian Hipotesis.....	104
4.1.7.	Hasil Koefisien Determinasi.....	108
4.2.	Pembahasan.....	111
4.2.1.	Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	111
4.2.2.	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	113
4.2.3.	Pengaruh Kesesuaian kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	115
4.2.4.	Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	117
BAB V PENUTUP.....		120
5.1.	Simpulan.....	120
5.2.	Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....		123
LAMPIRAN.....		128

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3. 1. Desa di Kecamatan Adiwerna.....	64
Tabel 3. 2 Penskoran Jawaban Kuisisioner	68
Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. 69	
Tabel 3. 4. Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal.....	70
Tabel 3. 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kesesuaian Kompensasi.....	71
Tabel 3. 6. Hasil Uji Validitas Variabel Moralitas Individu	72
Tabel 3. 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	73
Tabel 3. 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengendalian Internal	73
Tabel 3. 9. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesesuaian Kompensasi	74
Tabel 3. 10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Moralitas Individu	74
Tabel 3. 11. Kriteria Analisis Deskriptif Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	76
Tabel 3. 12. Kriteria Analisis Deskriptif Variabel Pengendalian Internal	76
Tabel 3. 13. Kriteria Analisis Deskriptif Variabel Kesesuaian Kompensasi	77
Tabel 3. 14. Kriteria Analisis Deskriptif Variabel Moralitas Individu	78
Tabel 4. 1. Jumlah Kuisisioner yang Dihimpun	84
Tabel 4. 2. Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	84
Tabel 4. 3. Profil Responden.....	85
Tabel 4. 4. Deskriptif Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	88
Tabel 4. 5. Analisis Statistik Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi... 88	
Tabel 4. 6 Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif per Indikator Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	89
Tabel 4. 7 Deskriptif Variabel Pengendalian Internal.....	90
Tabel 4. 8 Analisis Statistik Variabel Pengendalian Internal.....	90
Tabel 4. 9 Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif per Indikator Variabel Pengendalian Internal	91
Tabel 4. 10 Deskriptif Variabel Kesesuaian Kompensasi.....	92
Tabel 4. 11 Analisis Statistik Variabel Kesesuaian Kompensasi.....	93
Tabel 4. 12 Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif per Indikator Variabel Kesesuaian Kompensasi	94
Tabel 4. 13 Deskriptif Variabel Moralitas Individu.....	94
Tabel 4. 14 Analisis Statistik Variabel Moralitas Individu.....	95
Tabel 4. 15 Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif per Indikator Variabel Moralitas Individu	96
Tabel 4. 16. Uji Normalitas dengan <i>Kolmogrov-Smirnov</i>	97
Tabel 4. 17. Uji Linear Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	98

Tabel 4. 18. Uji Linear Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	99
Tabel 4. 19. Uji Linear Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	99
Tabel 4. 20. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	100
Tabel 4. 21. Uji Multikolinearitas	101
Tabel 4. 22. Uji Glejser	103
Tabel 4. 23. Hasil Uji F.....	105
Tabel 4. 24. Hasil Uji t.....	106
Tabel 4. 25. Hasil Uji Hipotesis	107
Tabel 4. 26. Hasil Koefisien Determinasi Simultan.....	109
Tabel 4. 27. Hasil Koefisien Determinasi Secara Parsial (r^2)	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. <i>Fraud Triangle</i>	21
Gambar 2. 2. Kerangka Berpikir	62
Gambar 4. 1. Normal P-P Plot Regression.....	98
Gambar 4. 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Tabulasi Kuisisioner	129
Lampiran 2 Output Spss Uji Validitas.....	148
Lampiran 3 Output Spss Uji Reliabilitas	161
Lampiran 4 Statistik Deskriptif Variabel	162
Lampiran 5 Statistik Deskriptif Indikator	168
Lampiran 6 Output Statistik Deskriptif Indikator	184
Lampiran 7 Output Uji Normalitas	187
Lampiran 8 Output Spss Uji Linearitas.....	188
Lampiran 9 Output Uji Multikolinieritas	189
Lampiran 10 Output Uji Heterokedastisitas.....	190
Lampiran 11 Output Uji F Dan Uji t.....	191
Lampiran 12 Output Koefisien Detrerminasi.....	192
Lampiran 13 Identitas Responden.....	193
Lampiran 14 Kuesioner Uji Coba	198
Lampiran 15 Kuesioner Penelitian.....	205
Lampiran 16 Daftar Pertanyaan Wawancara	213
Lampiran 17 Hasil Wawancara Terstruktur Observasi Awal	214
Lampiran 18 Surat Penelitian.....	216

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah dari tahun 2015 sampai sekarang. Baik tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Jumlah desa yang menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa pada tahun 2018 mencapai 74.957 desa. Anggaran yang diberikan pun tidak sedikit, setiap desa pada tahun 2018 memperoleh anggaran mencapai 1 miliar Rupiah.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia pada tahun 2015 mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan Dana Desa (DD). DD merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa (DD) bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2018 anggaran dana desa yang disalurkan pemerintah di Kecamatan Adiwerna mencapai Rp 23,1 milyar. Bupati Kabupaten Tegal, Umi Azizah menyatakan bahwa pada tahun 2018 penggunaan dana desa diharapkan tidak hanya untuk urusan infrastruktur saja tetapi, dapat digeser untuk keperluan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta inovasi desa (Sumber : www.tribunjatengnews.com, 11 November 2018). Hasil evaluasi pelaksanaan dana desa tahun 2018 yang disebutkan Kecamatan Adiwerna Dalam Angka 2018 terbukti menghasilkan sarana dan prasarana bagi masyarakat, antara lain terbangunnya 46,70 km jalan antar desa, 53 jembatan, 8,80 km irigasi, serta 2 bumdes.

Upaya tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa mempunyai hak otonomi untuk berkembang dan mengatur urusan rumah tangga desa sendiri dengan berbagai sumber daya, kekayaan, serta partisipasi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang dibantu oleh PTPKD (Pelaksanaan Teknik Pengelolaan Keuangan Desa).

Kepala desa terpilih dalam hal pengelolaan keuangan desa mempunyai otoritas untuk mengatur perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai landasan bagi otonomi desa bukan hanya secara normatif tapi juga secara praktik. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Seharusnya desa semakin terbuka dan memiliki responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga diharapkan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pemerintah semakin sadar tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa yang baik dimana desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil diberi otonomi untuk mengelola keuangannya agar dapat dilaksanakan secara maksimal. Pelaporan keuangan desa diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah Desa (SAPD) untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Hal tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mengawasi keuangan desa yang tidak lepas dari resiko tindakan kecurangan akuntansi.

Kecurangan akuntansi menjadi hal yang banyak dibicarakan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kecurangan akuntansi pada umumnya disebabkan oleh dorongan untuk memanfaatkan kesempatan atau dapat pula disebabkan tekanan dari manajemen untuk melakukan penyelewengan secara terstruktur. Zulkarnain (2013) menyebutkan bahwa kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Statement of Auditing Standart mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. Penyebab kecurangan seperti dijelaskan dalam segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yang terdiri dari tekanan, kesempatan dan sikap atau rasionalisasi. Tekanan yang dimaksud adalah tekanan dari pihak manajemen untuk melakukan kecurangan, kesempatan berarti terdapat situasi di dalam suatu instansi untuk melakukan kecurangan, dan sikap/rasionalisasi menunjukkan dimana suatu instansi merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur atau berbuat curang.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan kecurangan sebagai: (1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji

atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Adapun *Association of Certified Fraud Examinations* (2014) mengklasifikasikan kecurangan akuntansi dalam tiga kategori utama yaitu kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) dan korupsi (*corruption*).

Kecurangan akuntansi tidak hanya dapat terjadi di sektor swasta saja, tetapi juga dapat terjadi di sektor publik. Kasus tindakan kecurangan akuntansi yang terjadi di sektor publik umumnya dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang menduduki jabatan tertentu. Kepala desa dan PTPKD sebagai pemegang wewenang pengelolaan keuangan desa yang nominalnya tidak sedikit mempunyai tanggungjawab besar untuk mengelola keuangan desa. Resiko yang dihadapi oleh pemangku kepentingan pengelolaan keuangan desa ini adalah kepentingan publik yang senantiasa harus dijunjung karena dana desa diperuntukan untuk sepenuhnya kepentingan masyarakat, sehingga integritas orang yang bekerja dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa harus diutamakan. Hal tersebut karena faktor kesempatan yang ada dapat mempengaruhi integritas perangkat desa dalam bekerja. Penyebab seseorang berbuat kecurangan adalah bukan hanya berasal dari niat, ketika tidak ada niat untuk berbuat curang namun ada

kesempatan seperti yang disebutkan dalam teori *fraud triangle* maka seseorang bisa melakukan perbuatan curang.

Bentuk kecurangan yang banyak terjadi adalah tindakan korupsi. Menurut Adinda & Ikhsan (2015) tindak kecurangan di pemerintahan Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Pemerintah dalam dasawarsa terakhir telah membentuk dan memberdayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, tetapi hasil yang di dapat masih belum sesuai dengan harapan, di mana Indonesia masih menduduki 5 negara terkorup di Asia Tenggara (Sumber : www.tribunews.com, tanggal 29 januari 2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi sudah menjadi hal yang banyak dilakukan di lingkungan pemerintahan, dari level tertinggi hingga level terkecil pemerintahan seperti desa. Pelaku tindak pidana korupsi di pemerintahan mulai dari kepala pemerintahan, pejabat birokrasi, serta pegawai negeri sipil. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keuangan pemerintah kepada masyarakat, namun laporan keuangan merupakan hal yang rawan menjadi objek korupsi, dimana seharusnya angka yang ada pada laporan keuangan harus sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya dan bukan merupakan manipulasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Korupsi yang terjadi pada dana desa juga mempunyai banyak modus, seperti membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan pembangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber dana lain, hingga meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Pelaku korupsi dana desa berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) paling banyak dilakukan oleh kepala desa, dimana kepala desa mempunyai kedudukan yang strategis di pemerintahan desa. Data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka selain kepala desa yang menjadi aktor, ICW mengidentifikasi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu perangkat desa sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa (Sumber: www.radartegal.com, 11 Oktober 2018)

Salah satu bentuk adanya tindakan korupsi dana desa tersebut terjadi di Kabupaten Tegal. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Dispermades) Kabupaten Tegal, pada tahun 2018 terdapat sepuluh desa di Kabupaten Tegal diduga menyalahgunakan dana desa. Nominal anggaran yang disalahgunakan bervariasi, hal tersebut diketahui setelah instansi terkait melakukan monitoring dan meminta laporan hasil pekerjaan penggunaan dana. Bukan hanya dana desa saja yang disalahgunakan, tetapi juga penjualan harta desa atau aset desa yang tidak dimasukkan ke APBDes. Berdasarkan hasil monitoring tersebut 2 dari 10 desa tersebut adalah Desa Gumalar dan Desa Kedungsukun yang berada di Kecamatan Adiwerna. Berdasarkan monitoring Kepala Desa Kedungsukun telah melakukan tindakan kecurangan akuntansi dengan membuat kegiatan atau proyek fiktif dengan menggunakan dana desa, sedangkan kepala desa gumalar tidak melakukan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2017.

Penelitian tentang kecurangan akuntansi menjadi topik menarik untuk diteliti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *Fraud*. Putu dkk (2017) meneliti pengaruh efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Serta Prawira dkk (2014) meneliti pengaruh moralitas individu, asimetri informasi dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Alou dkk (2017) pengaruh kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen, dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi akibat dua faktor yaitu faktor dari dalam (*internal*) dan faktor dari luar (*eksternal*). Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi adalah pengendalian internal. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013), Prawira dkk (2014), Indriastuti (2016), dan Widiatami (2017) dimana pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Abdul Halim (2003:191) dalam Wijaya dkk (2017) struktur pengendalian internal merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencakup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis, bervariasi dan memiliki tujuan utama untuk menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas, menjaga efektif dan efisiensi operasi yang dijalankan, dan menjaga kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Ahriati (2015) menunjukkan hal yang berbeda dimana pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor lain yang mempengaruhi kecurangan akuntansi adalah kesesuaian kompensasi. Indriastuti dkk (2016) menjelaskan adanya ketidakadilan yang berkaitan dengan pemberian gaji dan kompensasi lainnya terhadap pegawai akan menimbulkan tekanan dalam diri pegawai tersebut untuk melakukan tindakan menyimpang seperti kecurangan (*fraud*). Kesesuaian Kompensasi adalah kecocokan dan kepuasan karyawan/pegawai/pekerja atas apa yang diberikan instansi kepada mereka baik berupa upah perjam maupun gaji secara periodik sebagai balasan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dan dengan adanya kesesuaian kompensasi diharapkan dapat mencegah dan meminimalisasikan

tindakan kecurangan akuntansi di dalam instansi (Dewi, 2017). Jadi semakin tinggi kesesuaian kompensasi yang diterima seseorang maka akan semakin rendah kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) yang menyebutkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dimana semakin tinggi tingkat kesesuaian kompensasi maka semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal berbeda terdapat pada penelitian Alou dkk (2017) dan Indra (2017) yaitu kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini membuktikan bahwa terdapat *research gap* dalam penelitian ini terkait pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ukuran kesesuaian kompensasi dapat dilihat dari unsur-unsur yang ada didalamnya yaitu upah dan gaji, insentif, tunjangan, dan fasilitas.

Moralitas individu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawira dkk (2014) dan Indriastuti (2017) yang menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Puspasari (2016) individu memiliki pandangan mereka sendiri tentang apa hal yang benar. Individu merasa bahwa hal yang benar adalah apa yang menjadi kepentingan individu. Kemudian pada tahap moralitas yang lebih tinggi individu mengasumsikan bahwa kebenaran didasarkan pada prinsip-prinsip etis, kesetaraan hak asasi manusia dan martabat sebagai makhluk

hidup. Sehingga moralitas masing-masing individu akan mempengaruhi bagaimana ia akan berperilaku.

Penelitian Wijaya dkk (2017) juga mendukung hal tersebut dimana moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Semakin tinggi level penalaran moral individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak melakukan kecurangan akuntansi. Moralitas individu dapat diukur dengan menilai tingkat kedisiplinan seseorang, dimana unsur disiplin dibentuk oleh konsistensi dan otoritas suatu organisasi. Keterikatan dengan masyarakat, seberapa masyarakat merasa terbantu atas kinerja perangkat desa, serta otonomi yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Hal berbeda terdapat pada penelitian Budiantari (2017) dimana moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, topik tentang kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan topik yang menarik dan penting untuk diteliti. Anggaran dana desa yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun namun juga diikuti dengan kenaikan kasus korupsi dana desa yang semakin tinggi menyebabkan masyarakat terampas haknya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Desa Se Kecamatan Adiwerna.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terdapat 27 kasus korupsi dana desa di Indonesia pada semester I tahun 2018 dengan nilai kerugian mencapai Rp 40,6 miliar. Kepala desa merupakan aktor terbanyak yang melakukan korupsi dana desa yaitu sejumlah 29 orang.
2. Tahun 2018 10 orang kepala desa di Kabupaten Tegal diperiksa oleh inspektorat karena diduga melakukan korupsi dana desa, 2 orang dari 10 orang kepala desa tersebut adalah kepala desa Gumalar dan Kedungsukun yang berada di Kecamatan Adiwerna.
3. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Adiwerna belum terlaksana sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga terjadi kecurangan akuntansi. Pencatatan pengelolaan dana desa telah diatur dalam SAPDesa untuk memenuhi kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa tindakan korupsi dana desa dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan desa, seperti yang terjadi di desa Kedungsukundimana terdapat proyek fiktif yang dianggarkan dari dana desa. Kepala desa Kedungsukunmelakukan pencatatan atas dana desa yang sebenarnya tidak digunakan untuk kepentingan desa melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan di desa Gumalar pelaporan pertanggungjawaban dana desa terlambat dilakukan.

4. Berdasarkan penelitian yang ada kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi akibat dua faktor yaitu faktor dari dalam (*internal*) dan faktor dari luar (*eksternal*).
5. Salah satu faktor dari luar yaitu adanya pengendalian, khususnya pengendalian internal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal mampu mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Sistem pengendalian internal yang ada di pemerintahan desa masih lemah sehingga resiko terjadinya kecurangan akuntansi masih besar.
6. Penelitian yang ada juga menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan akuntansi. Kompensasi atau gaji yang diterima oleh perangkat desa di Kecamatan Adiwerna sudah sesuai dengan penghasilan minimal perangkat desa yang telah ditetapkan peraturan dimana besarnya gaji perangkat desa berbeda-beda antar daerah karena disesuaikan dengan peraturan kepala daerah dan penghasilan asli desa tersebut, namun penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda dimana kesesuaian kompensasi mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.
7. Moralitas individu sebagai faktor dari dalam (*internal*) berdasarkan penelitian-penelitian yang ada juga mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.3. Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka cakupan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini tidak menguji semua faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi untuk memfokuskan penelitian agar tidak melebar dari hasil yang diharapkan. Maka fokus penelitian ini hanya pada tiga faktor yaitu pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu.
2. Penelitian ini dilakukan disemua desa yang ada di Kecamatan Adiwerna dengan responden penelitian kepala desa dan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

1.4. Rumusan masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu secara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna ?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna ?
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna ?

4. Apakah moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh negatif pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna.
2. Untuk menguji pengaruh negatif pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna.
3. Untuk menguji pengaruh negatif kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna.
4. Untuk menguji pengaruh negatif moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna.

1.6. Kegunaan Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnyaterkait faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi di lingkungan pemerintah desa. Selain itu juga penelitian ini dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya terkait kecenderungan kecurangan akuntansi khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan informasi bagi pemerintah desa untuk dapat melakukan sosialisasi serta evaluasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu. Sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan dengan baik serta kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa dapat terpenuhi.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana seharusnya pemerintah desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa

sehingga tindakan kecurangan akuntansi di lingkungan pemerintah desa dapat diminimalisir.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prawira dkk (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Buleleng)”. Perbedaan penelitian ini terdapat pada variabel asimetri informasi yang diganti dengan variabel kesesuaian kompensasi.

Alasan mengganti variabel asimetri informasi menjadi variabel kesesuaian kompensasi adalah karena berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel asimetri menunjukkan hasil yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan variabel kesesuaian kompensasi menunjukkan hasil berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi namun ada pada penelitian lain menyebutkan bahwa ada atau tidaknya pemberian kompensasi yang sesuai tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini disebabkan oleh kompensasi yang diperoleh tidak merata untuk semua pegawai PTPKD karena ditetapkan berdasarkan peraturan kepala daerah dan penghasilan asli desa. (Ahriati dkk, 2015). Maka peneliti menggunakan variabel kesesuaian kompensasi untuk membuktikan kebenarannya. Variabel kesesuaian kompensasi juga sesuai dengan teori *fraud triangle* atau segitiga kecurangan dimana penyebab

kecurangan adalah *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (sikap), maka variabel yang sesuai dengan teori tersebut adalah kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan moralitas individu.

Perbedaan selanjutnya yaitu terkait lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada seluruh desa yang ada di Kecamatan Adiwerna, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Buleleng, karena peneliti tersebut ingin mengetahui apakah moralitas individu, asimetri informasi, dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada karyawan yang bekerja pada Badan Usaha Milik Daerah di kabupaten Buleleng. Alasan yang mendasari memilih objek seluruh desa di Kecamatan Adiwerna adalah karena peneliti ingin mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan sesuai peraturan dan juga apakah sudah sesuai dengan SAPDesa yang dibuat pemerintah agar pengelolaan keuangan desa lebih akuntabel dan transparan sehingga kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikurangi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958). Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan–potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab–sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Teori atribusi menekankan pada bagaimana setiap individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Orang akan berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu dan memberikan penyebab bagi perilaku.

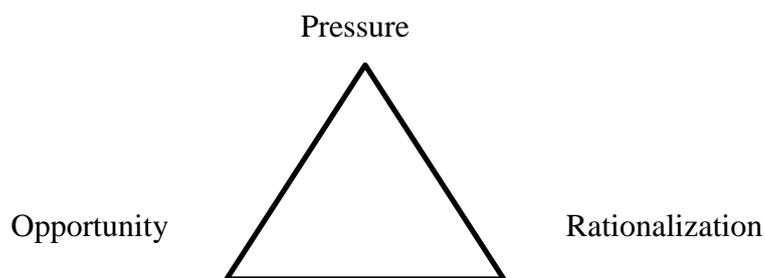
Malle (2011) menyatakan bahwa dalam psikologi sosial istilah atribusi memiliki dua makna, yaitu penjelasan perilaku dan kesimpulan. Kedua makna tersebut memiliki kesamaan yaitu atribusi sebagai proses penugasan. Atribusi sebagai penjelasan perilaku merujuk pada penyebab perilaku yang terjadi sedangkan atribusi sebagai kesimpulan merujuk pada kualitas atau atribut yang diberikan kepada seseorang berdasarkan perilaku yang tampak.

Berdasarkan pengembangan teori atribusi diatas Ikhsan dan Ishak (2005:55) dalam Indriastuti dkk (2016) menjelaskan bahwa tindakan seorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang dipengaruhi oleh atribut penyebab antara lain terdiri dari kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*). Jadi atribusi kepemimpinan tidak terlepas dari cara berpikir, berperasaan, bertindak, bersikap, dan berperilaku dalam kerja di sebuah organisasi dengan bawahannya atau orang lain.

2.1.2. Teori Fraud Triangle

Fraud triangle adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey setelah melakukan penelitian untuk tesis doktor-nya pada tahun 1950. Cressey mengemukakan hipotesis mengenai *fraud triangle* untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan kecurangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Cressey menemukan bahwa orang melakukan kecurangan ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka.

Cressey dalam Najahningrum (2013) juga menambahkan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. Dari penjelasan di atas, maka ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan *fraud*, yaitu yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi), sebagaimana tergambar berikut ini.



Gambar 2. 1. Fraud Triangle

1. Pressure

Pressure (tekanan) memiliki berbagai arti, di antaranya keadaan di mana kita merasa ditekan, kondisi yang berat saat kita menghadapi kesulitan, sesuatu yang dapat membuat kita meningkatkan perhatian dalam melakukan tindakan, meningkatkan ingatan dan kemampuan untuk mengingat. Dengan kata lain *pressure* dapat meningkatkan kinerja. Akan tetapi, di lain pihak dapat menjadi salah satu sumber dari munculnya *fraud* dan akhirnya menjadi salah satu elemen dari *fraud triangle*. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan *pressure* adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, dan ketergantungan narkoba. Pada umumnya yang mendorong

terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

2. Opportunity

Opportunity adalah peluang / kesempatan yang dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena pengendalian internal suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling mendasari terjadinya kecurangan. Peluang ini dapat muncul kapan saja, sehingga pengawasan dan kontrol internal perusahaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya peluang seseorang melakukan kecurangan. Seseorang yang tanpa tekanan sekalipun dapat melakukan kecurangan dengan adanya peluang ini, meskipun pada awalnya tidak ada peluang untuk melakukan ini.

3. Rationalization

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan bahwa faktor ketiga terjadinya sebuah *fraud* adalah rasionalisasi. Secara garis besar rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Para pakar sosiolog merujuk pada proses di mana

peningkatan jumlah tindakan sosial menjadi berdasarkan pertimbangan efisiensi perhitungan bukan pada motivasi yang berasal dari moralitas, emosi, kebiasaan atau tradisi. Rasionalisasi merupakan senjata yang digunakan para pelaku dalam menyangkal seluruh kesalahan atau kecurangan yang mereka buat dengan tujuan mempertahankan citra diri.

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

2.2.1.1. Pengertian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan). Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Dalam kecurangan terkandung aspek penipuan (*deception*), ketidakjujuran (*dishonest*), dan niat (*intent*).

Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan atau *fraud* merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. *Statement of Auditing Standart* dalam Indra (2017) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. Salah saji material dalam laporan keuangan akan menyesatkan *stakeholder* atau pengguna

laporan keuangan karena informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Kecurangan singkatnya adalah sebuah representasi yang salah atau penyembunyian fakta fakta yang material untuk mempengaruhi seseorang agar mau ambil bagian dalam dalam suatu hal yang berharga. Menurut Eliza (2015) kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam kaitannya dengan konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain.

Sedangkan *Black's Law Dictionary Fraud* menguraikan pengertian *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua yang tidak terduga, penuh siasat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan curang (*cheating*) yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti.

Kecurangan juga dapat diartikan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan haram (*illegal advantage*) yang bisa berupa uang, barang/harta, jasa, tidak memayar jasa (contoh : tidak membayar jasa listrik/air/gas sepenuhnya dengan cara menyuap petugas

yang mencatat meteran pemakaian listrik/air/gas), atau memperoleh bisnis (“memenangkan” tender pengadaan barang/jasa dengan cara menyuap pejabat atau menyalurkan bisnis kepada anggota keluarga atau kerabat) (Tuanakotta, 2014:28).

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat dapat disimpulkan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja yang dilakukan pada sebuah pelaporan keuangan dengan menyembunyikan kebenaran, melakukan manipulasi, dan tindakan membohongi atau mengelabui dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi dan bagi golongan tertentu.

2.2.1.2. Klasifikasi Kecurangan Akuntansi

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat dalam Priantara (2013:68), merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga kelompok berdasarkan perbuatan, yaitu:

1. Penyimpangan atas Asset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Kecurangan jenis ini yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktorintegritasnya masih dipertanyakan. Korupsi sering kali tidak dapat dideteksi karena parapihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Sedangkan dalam sektor pemerintahan Menurut Pristiyanti (2012) semua jenis *fraud* dapat terjadi pada sektor pemerintahan, akan tetapi yang paling sering terjadi adalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corumpere* yang artinya busuk, rusak, mengenyahkan, memutarbalik atau menyogok. Secara harfiah korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi ataupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya

mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

2.2.1.3. Indikator Kecurangan Akuntansi

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyebutkan bahwa indikator untuk kecenderungan kecurangan akuntansi pada bentuk kecurangan laporan keuangan adalah :

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung lainnya
2. Penyajian salah
3. Salah penerapan prinsip secara sengaja
4. Ketidaktepatan aset

Wilopo (2006) menyebutkan beberapa indikator pengukuran kecenderungan kecurangan akuntansi, yaitu :

1. Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung lainnya.

Individu atau organisasi bisanya melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi pada sebuah instansi dengan tindakan manipulasi bukti-bukti transaksi seperti menggunakan bukti transaksi yang isi dan nominalnya tidak sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya. Melakukan pemalsuan dokumen-dokumen transaksi dan dokumen-dokumen pendukung, hingga melakukan pencatatan pada jurnal dengan tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan akuntansi yang ada.

2. Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan.

Untuk kepentingan individu atau organisasi tertentu biasanya individu atau organisasi tersebut dengan saja melakukan salah saja tau salah mencatat seperti menambah nominal transaksi.

3. Kecenderungan untuk melakukan salah menerapkan prinsip akuntansi secara sengaja.

Individu atau organisasi juga biasanya dengan sengaja melakukan penerapan prinsip akuntansi yang salah, seperti asumsi pencatatan jumlah dan klasifikasi pencatatan transaksi.

4. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan/penggelapan) terhadap aktiva yang membuat organisasi membayar barang/jasa yang tidak diterima.

Hal tersebut dilakukan dengan cara merekayasa suatu transaksi yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi sehingga menimbulkan kerugian yang ditanggung organisasi.

5. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di diantara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Hal tersebut dilakukan untuk menutupi suatu transaksi yang tidak semestinya terjadi yang terjadi terhadap aktiva dengan cara memanipulasikan dokumen, penggelapan, hingga menghilangkan

dokumen transaksi yang dilakukan dengan kerja sama bersama pihak lain yang terlibat.

Sedangkan menurut *association of certified fraud examinations (acfe)* dalam Najahningrum (2013), indikator kecurangan terdiri dari:

1. kecurangan laporan keuangan
2. penyalahgunaan aset
3. Korupsi

2.2.2. Pengendalian Internal

2.2.2.1. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut *Committee of Sponsoring Organisation* dalam Yadiati dan Mubarak (2017:29) pengendalian internal di definisikan sebagai berikut :

Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : (1) Effectiveness and efficiency of operations, (2) Reability of financial reporting, (3) Compliance with applicable laws and regulations (Moeller and Witt, 1999;18).

Dari definsi diatas diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (1) efektivitas dan efisiensi operasi, (2) keandalan laporan keuangan, (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan, kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko keuangan dalam pencapaian tujuan perusahaan (Kumaat, 2014:65). Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi. Pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi (Budiantari dkk, 2017). Dalam hal ini peran inspektorat selaku pengawas internal harus mampu membantu pemerintah daerah untuk mengefektifkan sistem pengendalian internal yang dimiliki (Ahriati dkk, 2015).

Aktivitas pengendalian dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok sebagai berikut :

1. Pengendalian pengelolaan informasi
2. Pemisahan fungsi yang memadai
3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan
4. Review atas kinerja.

Pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diadopsi oleh pemerintah desa untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap

undang-undang dan aturan yang berlaku (Atmadja dkk, 2015). Efektivitas pengendalian internal juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap adanya tindak kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang lemah atau longgar dapat memberikan peluang seseorang untuk melakukan perilaku kecurangan akuntansi yang dapat merugikan suatu instansi atau lembaga. Pengendalian internal dapat memelihara kebenaran dari laporan keuangan dan mencegah kecurangan (Lou dan Wang, 2009).

Pengendalian internal dirancang untuk dapat mengamankan harta milik organisasi, bila pengendalian internal tidak dapat berfungsi efektif sebagai sarana kendali, kemungkinan besar terjadi *fraud*. Sistem pengendalian yang buruk akan memicu seseorang melakukan perbuatan *fraud* dan melawan hukum. Menurut Widiutami dkk (2017) pengendalian internal meliputi lima kategori pengendalian, yaitu (1) lingkungan kendali, (2) penilaian resiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pengawasan. Keefektifan pengendalian internal dalam organisasi dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan. Adanya pengendalian internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Kesesuaian pengendalian intern berpengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.

Alou dkk (2017) mengemukakan pengertian pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah

dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Indra, 2017). Dimana fungsi dari adanya pengendalian yaitu :

1. *Preventif*, yaitu pengendalian untuk mencegah kesalahan-kesalahan baik itu berupa kekeliruan ataupun ketidakberesan yang sering terjadi dalam operasi suatu kegiatan.
2. *Detective*, yaitu untuk mendeteksi kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi.
3. *Corective*, yaitu untuk memperbaiki kelemahan, kesalahan dan penyimpangan yang terdeteksi.
4. *Directive*, yaitu untuk mengarahkan agar pelaksanaan dilakukan dengan tepat dan benar.
5. *Compensative*, yaitu untuk menetralisasi kelemahan pada aspek kontrol yang lain.

Mekanisme pengendalian internal yang tidak efisien atau tidak ada telah menyebabkan banyak masalah dan kerugian. Analisis terperinci tentang penerapan metode pengendalian internal sangat penting. Menerapkan prosedur pengendalian internal yang memadai sangat efektif (Mirinaviciene, 2014). Jadi dapat disimpulkan pengendalian internal adalah sebuah proses untuk mengarahkan,

mengawasi, dan melindungi sumber daya organisasi agar terhindar dari segala bentuk tindakan kecurangan.

2.2.2.2. Klasifikasi Pengendalian Internal

Menurut Wilopo (2008) pengendalian internal birokrasi pemerintahan terdiri atas tiga unsur, antara lain:

1. Lingkungan Pengawasan Umum

Tingkat lingkungan pengawasan ditentukan oleh sikap dan kadar pemahaman dan kepentingan pemimpin negara akan pentingnya sistem pengendalian birokrasi yang kuat, tingkat hubungan pelaporan diantara unit organisasi birokrasi, tingkat kompetensi dan kejujuran dari birokrat, derajat pendelegasian dan pembatasan wewenang dari birokrasi, tingkat pemahaman birokrasi dan kebijakan prosedur, serta tingkat pengendalian keuangan dan pengelolaan termasuk penggunaan komputer telah dimantapkan dan diamankan dengan baik.

2. Risiko yang melekat untuk berkorupsi

Risiko yang melekat untuk berkorupsi ditentukan oleh tingkat kejelasan dari suatu program, serta jumlah perijinan. Selain itu, ditentukan juga oleh seberapa besar anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

3. Sarana Pengamanan

Sarana pengamanan dan pengendalian ini terdiri dari tersedianya sumber informasi (data base dan lainnya), ketersedianya narasumber yang kompeten untuk pengumpulan informasi, tersedianya peta yang

menggambarkan wilayah yang rawan korupsi, serta agenda untuk menurunkan tingkat kerawanan tersebut.

Keberhasilan pengendalian internal pemerintah tidak hanya bertumpu pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi. Peraturan pemerintah tentang pengendalian internal pemerintah juga menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan instansi pemerintah tersebut.

Mulyani dan Suryawati (2011) membagi tindakan/aktivitas pengendalian yang ada dalam organisasi menjadi :

1. Pengendalian Pencegahan (*preventive controls*) bertujuan untuk mencegah galat (*errors*) atau peristiwa yang tidak diinginkan terjadi.
2. Pengendalian Pendeteksian (*detective controls*) bertujuan untuk menginformasikan kepada manajemen galat atau masalah yang sedang terjadi atau beberapa saat setelah terjadi.
3. Pengendalian Pemulihan (*corrective controls*) biasanya digunakan bersama dengan pendeteksian, bertujuan untuk memperbaiki kembali dari akibat terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan.

2.2.2.3. Indikator Pengendalian Internal

Menurut Rae dan Subramaniam (2008), pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam:

1. efektivitas dan efisiensi operasi,
2. keandalan pelaporan keuangan, dan
3. kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku

Komponen Sistem Pengendalian Internal menurut COSO dalam (Dewi, 2017) pengendalian intern terdiri dari 5 komponen yang saling terkait yaitu :

1. Lingkungan pengendalian (*Control environment*) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup: (1)Integritas dan nilai etika,(2) Komitmen terhadap kompetensi,(3) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit, (4) Filosofi dan gaya operasi manajemen, (5) Struktur organisasi, (6)Pemberian wewenang dan tanggung jawab, (7)Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
2. Penaksiran resiko (*Risk assesment*) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut: (1)Perubahan dalam lingkungan organisasi,(2) Personel baru,(3) Sistem informasi yang baru atau

diperbaiki,(4) Teknologi baru,(5)Lini produk, produk atau aktivitas baru,(6) Operasi luar negeri, (7) Standar akuntansi baru.

3. Standar pengendalian (*Control activities*) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan (1) Penelaahan terhadap kinerja,(2) Pengolahan informasi,(3) Pengendalian fisik, (4) Pemisahan tugas.
4. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*) adalah pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.
5. Pemantauan (*Monitoring*) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

2.2.3. Kesesuaian Kompensasi

2.2.3.1. Pengertian Kompensasi

Kompensasi adalah salah satu hal yang penting bagi setiap pegawai yang bekerja dalam suatu perusahaan. Bagi seorang pegawai, kompensasi merupakan suatu *outcome* atau *reward* yang penting karena dengan kompensasi yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Adinda dan Ikhsan, 2015). Kompensasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap perilaku karyawan, seseorang cenderung akan berperilaku curang untuk memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri. Biasanya karyawan akan melakukan kecurangan karena ketidakpuasaan atau kekecewaan dengan hasil atau kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan. Dengan kompensasi yang sesuai, diharapkan dapat meminimalisasikan tindakan kecurangan dan dapat memberikan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi tempat mereka bekerja.

Alou dkk (2017) kompensasi adalah apa yang seorang karyawan/pegawai/pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya baik upah perjam ataupun gaji periodik yang didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Kompensasi adalah salah satu hal yang penting bagi setiap pegawai yang bekerja dalam suatu perusahaan, bagi seorang pegawai, kompensasi merupakan suatu *outcome* atau *reward* yang penting karena dengan kompensasi yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Persepsi kesesuaian kompensasi terdiri dari 8 item pernyataan yang dikembangkan dari Pristiyanti (2012) yang meliputi indikator-indikator : (1) gaji

dan upah menggambarkan hasil pekerjaan yang dilakukan, (2) gaji dan upah sesuai dengan kinerja, (3) Prosedur gaji dan upah mengekspresikan pandangan dan perasaan, (4) Penetapan prosedur gaji dan upah melibatkan pegawai diaplikasikan secara konsisten, (5) Prosedur gaji dan upah tidak mengandung kepentingan tertentu, (6) Prosedur gaji dan upah didasarkan pada informasi yang akurat, (7) Prosedur gaji dan upah memungkinkan pemberian masukan dan koreksi, dan (8) Prosedur gaji dan upah sesuai dengan etika dan moral.

Moral manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pola pikir ini akan berdampak pada berkurangnya keinginan untuk melakukan kecurangan dari dalam diri seseorang (Budiantari dkk, 2017). Secara konseptual kesesuaian kompensasi berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Tujuan kesesuaian ini adalah kesejahteraan sehingga yang didistribusikan biasanya berhubungan dengan sumber daya, ganjaran atau keuntungan (Indra, 2017).

Kompensasi adalah penghargaan atau ganjaran kepada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya melalui kegiatan yang disebut bekerja. Widyaswari dkk (2017) mengatakan bahwa adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Pencurian tersebut dapat berupa pencurian uang, peralatan, serta persediaan barang yang dilakukan oleh pekerja. Hal tersebut merupakan masalah yang

penting bagi organisasi. Kecurangan yang dilakukan seseorang disebabkan oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Tindakan tersebut tidak lain didorong oleh ketidakpuasan individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan instansi atau pemerintah termasuk melakukan kecurangan akuntansi. Kompensasi yang sesuai diharapkan mampu mengurangi adanya keinginan untuk melakukan tindak kecurangan. Kompensasi yang sesuai dapat mengurangi tekanan untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Menurut Radhiah (2016) Jika para karyawan tidak puas atas kompensasi yang diterimanya maka akan berdampak terhadap organisasi. Artinya jika ketidakpuasan tersebut tidak diselesaikan dengan baik, maka setiap karyawan menyatakan keinginan untuk memperoleh kompensasi yang sesuai. Kompensasi yang sesuai merupakan rangkaian dengan berbagai segi kehidupan, seperti prestasi kerja, keluhan, terjadinya kecelakaan dalam melaksanakan tugas, dan adanya keinginan untuk pindah kerja. Organisasi memberikan kompensasi yang sesuai untuk menghindari adanya keinginan untuk menambah penghasilan lain. Dengan demikian kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi dapat dikurangi (Ahriati dkk, 2015).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesesuaian adalah perihal sesuai, keselarasan atau kecocokan. Kompensasi merupakan hasil kerja atau balas jasa pegawai yang berwujud nominal (uang) yang diberikan majikan

(pimpinan) kepada pegawainya. Kompensasi dapat berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif dan produktif, sebab kompensasi adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan (Radhiah, 2016). Dengan demikian kesesuaian kompensasi adalah kecocokan dan kepuasan karyawan/pegawai/pekerja atas apa yang diberikan instansi kepada mereka baik berupa upah perjam maupun gaji secara periodik sebagai balasan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dan dengan adanya kesesuaian kompensasi diharapkan dapat mencegah dan meminimalisasikan tindakan kecurangan akuntansi di dalam instansi.

Maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi adalah besarnya gaji atau pendapatan lain yang diterima oleh seseorang yang bekerja dimana besaran tersebut sesuai dengan beban kerja yang dilakukan dan dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan dan menimbulkan kesejahteraan bagi yang menerimanya.

2.2.3.2. Klasifikasi Kompensasi

Komponen-komponen dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan kompensasi menurut Rivai dkk (2010), komponen kompensasi terdiri dari:

1. Gaji, Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan atau sebagai bayaran tetap yang diterima seorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan.

2. Upah, Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Upah dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan.
3. Insentif, Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan tergantung kinerjanya melebihi standar yang ditentukan.
4. Kompensasi tidak langsung (*Fringe Benefit*), *Fringe benefit* merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Contohnya, berupa fasilitas-fasilitas, seperti: asuransi-asuransi, tunjangan-tunjangan, uang pensiun dan lain-lain.

2.2.3.3. Indikator Kesesuaian Kompensasi

Indikator pengukuran variabel kesesuaian kompensasi dikembangkan dari penelitian Colquitt (2001) dalam Najahningrum (2013) yaitu :

1. Kompensasi menggambarkan usahan yang dilakukan
2. Kompensasi menggambarkan apa yang diberikan kepada perusahaan
3. Kompensasi sesuai dengan kinerja keadilan prosedural merupakan pertimbangan yang dibuat oleh karyawan mengenai keadilan yang dipersepsikan mengenai proses dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya Ivancevich et al (2006).

Indikator-indikator kompensasi menurut Simamora, (2004:445) diantaranya adalah :

1. Upah dan gaji

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji. Upah merupakan basis bayaran yang seringkali digunakan bagi karyawan produksi dan pemeliharaan. Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, atau tahunan.

2. Insentif

Insentif adalah tambahan kompensasi diatas atau diluar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan.

3. Tunjangan

Tunjangan adalah pembayaran-pembayaran (*payment*) dan jasa-jasa (*service*) yang melindungi dan melengkapi gaji pokok. Contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, progam pensiun, dan tunjangan lainnya.

4. Fasilitas

Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan/fasilitas seperti mobil dinas dan rumah dinas. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansial dari kompensasi, terutama bagi eksekutif yang dibayar mahal.

2.2.4. Moralitas Individu

2.2.4.1. Pengertian Moralitas Individu

Kata moral yang berasal dari bahasa Latin yang secara etimologis serupa dengan kata etika yang berasal dari bahasa Yunani yaitu berarti adat kebiasaan. Moralitas dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik atau buruknya sifat sebagai manusia. Menurut Prawira dkk (2014) mengetahui level penalaran moral seseorang akan menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu melakukan suatu tindakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan dilema etika, berdasarkan level penalaran moralnya.

Moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Semakin tinggi level penalaran moral individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak melakukan kecurangan akuntansi (Wijaya dkk, 2017). Faktor lain yang berkaitan dengan tindak kecurangan akuntansi adalah tingkat moralitas individu karyawan yang ada dalam suatu organisasi. Faktor penyebab kecurangan akuntansi dapat dibedakan yaitu faktor perusahaan (*eksternal*) dan faktor dalam diri individu (*internal*) sebagai pelaku. Moralitas individu dan perilaku yang melekat padadirinya individu tersebut menjadi aspek yang berhubungan dengan faktor individu (*internal*). Moralitas individu akan dijelaskan dalam level penalaran moral individu, serta akan berpengaruh pada perilaku etis mereka (Puspasari, 2016).

Menurut Puspasari (2016) level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral

yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Dalam tindakannya, orang yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan sanksi hukum.

Lawrence Kohlberg (1995:27) kemudian mengkategorisasi dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam enam tahap yang berbeda. Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan: pra-konvensional, konvensional, dan post-konvensional. Dengan moralitas individu yang baik diharapkan dalam melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar sehingga mengurangi adanya kecurangan akuntansi.

Moral dalam bahasa latin moralitas adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau oranglainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu, tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa moralitas individu adalah keyakinan seseorang tentang benar salah, baik buruk suatu hal yang sesuai dengan kesepakatan sosial yang ada pada suatu masyarakat yang mendasari suatu tindakan atau pemikiran.

2.2.4.2. Klasifikasi Moralitas Individu

Klasifikasi moral menurut Wijayanti dan Hanafi (2018) dapat dibedakan menjadi:

1. Moral Objektif

Adalah moralitas yang terlihat pada perbuatan sebagaimana adanya, terlepas dari bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. Moralitas ini dinyatakan dari semua kondisi subjektif khusus pelakunya. Misalnya, kondisi emosional yang mungkin menyebabkan pelakunya lepas control. Apakah perbuatan itu memang dikehendaki atau tidak. Moralitas objektif sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang hakekatnya baik atau jahat, benar atau salah. Misalnya : (1) Menolong sesama manusia adalah perbuatan baik, (2) Mencuri, memperkosa, membunuh adalah perbuatan jahat. Tetapi pada situasi khusus, mencuri atau membunuh adalah perbuatan yang dibenarkan jika untuk mempertahankan hidup atau membela diri. Jadi moralitasnya terletak pada upaya untuk mempertahankan hidup atau membela diri (hak untuk hidup adalah hak asasi).

2. Moral Subjektif

Moralitas yang melihat perbuatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional, dan perlakuan personal lainnya.

Moralitas ini mempertanyakan apakah perbuatan itu sesuai atau tidak dengan suara hati nurani pelakunya. Moralitas Subjektif sebagai norma gabungan dengan semua perbuatan yang diwarnai niat pelakunya, niat baik

atau niat buruk. Dalam musibah kebakaran misalnya, banyak orang yang membantu menyelamatkan harta benda korban, ini adalah niat baik. Tetapi jika tujuan akhirnya adalah mencuri harta benda karena tak ada yang melihat, maka perbuatan tersebut adalah jahat. Jadi moralitasnya terletak pada niat pelaku.

Moralitas juga dapat dibedakan menjadi moralitas Instrinsik atau ekstrinsik. Moralitas Instrinsik menentukan perbuatan itu benar atau salah berdasarkan hakekatnya, terlepas dari pengaruh hukum positif. Artinya penentuan benar atau salah perbuatan tidak tergantung pada perintah atau larangan hukum positif. Misalnya :Gotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal, jangan menyusahkan orang lain, dan berikanlah yang terbaik.

2.2.4.3. Indikator Moralitas Individu

Menurut Ritzer dan Goodman (2008) dalam Indriastuti dkk (2016) moralitas individu dapat diukur melalui :

1. Disiplin, dimana unsur disiplin dibentuk oleh konsistensi dan otoritas suatu organisasi.
2. Keterikatan dengan masyarakat, dan
3. Otonomi yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Tahapan perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg (1995:50) bisa menjadi indikator untuk mengukur moralitas individu. Terdapat tiga tahapan perkembangan moral, yaitu:

1. *Pre-conventional*, tahapan yang paling rendah, individu akan cenderung bertindak karena tunduk dan takut pada hukum yang ada.
2. *Conventional*, individu memiliki dasar pertimbangan moral yang berkaitan dengan pemahaman hukum, aturan sosial di masyarakat, kewajiban, dan keadilan dalam lingkungan sosialnya.
3. *Post-conventional*, individu telah menunjukkan kematangan moral manajemen yang lebih tinggi dan mampu menyikapi isu-isu etis terkait perilaku pertanggungjawaban sosial pada orang lain.

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal dari penelitian sekaligus sebagai variabel penguat terhadap variabel-variabel penelitian yang akan dilakukan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu variabel kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan tiga variabel independen yaitu pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu. Rangkuman jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan digunakan untuk mendukung penyusunan kerangka berpikir, disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil
1.	James (2003)	<i>The Effects of Internal Audit</i>	Studi ini menguji apakah struktur pelaporan-audit internal dan

No	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil
		<i>Structure on Perceived Financial Statement Fraud Prevention.</i>	pengaturan sumber mempengaruhi persepsi pengguna terhadap perlindungan mereka dari kecurangan laporan keuangan. Tes memberikan bukti bahwa departemen audit internal yang melaporkan kepada komite audit dianggap lebih mampu mencegah kecurangan laporan keuangan dan lebih mungkin melaporkan penipuan yang terdeteksi daripada departemen audit internal yang melapor kepada manajemen senior. Dengan demikian, struktur pelaporan audit internal tampaknya mempengaruhi persepsi pengguna
2.	Lou dan Wang (2009)	<i>Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assessing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting.</i>	Hasil menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang curang tersebut berkorelasi positif dengan salah satu kondisi berikut: tekanan keuangan lebih besar dari perusahaan atau pengawas perusahaan, rasio transaksi yang lebih tinggi yang kompleks, integritas manajer perusahaan yang lebih dipertanyakan, atau semakin memburuknya hubungan antara tegas dan auditornya

No	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil
3.	Najahningrum (2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY.	<p>1. Variabel Keefektifan Pengendalian Internal (KPI) berdasarkan tabel uji path coefficient menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0,169 dan nilai t-statistic sebesar 2,134 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud,</p> <p>2. Variabel Asimetri Informasi (AI) berdasarkan tabel uji path coefficient menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0,315 dan nilai t-statistic sebesar 5,760 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap fraud,</p>
4.	Prawira dkk (2014)	Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi Dan Efektivitas Pengendalian	<p>Moralitas aparat, asimetri informasi, dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi.</p> <p>Dari penjelasan di atas maka dapat</p>

No	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil
		Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada BUMD Kabupaten Buleleng).	disimpulkan bahwa perubahan kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi yang terjadi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya moralitas individu, asimetri informasi dan efektivitas pengendalian internal.
5.	Indriastuti (2016)	Analisis Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asimetri Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan akuntansi pada taraf signifikansi 5% (one tailed) 2. Pengendalian Internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi pada taraf signifikansi 5% (one tailed) 3. Persepsi Kesesuaian Kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi pada taraf signifikansi 5% (one tailed) 4. Moralitas Individu berpengaruh signifikan

No	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil
			<p>negatif terhadap kecurangan akuntansi pada taraf signifikansi 5% (one tailed)</p> <p>5. ketaatan aturan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.</p>
6.	Puspasari (2016)	<i>Fraud Theory Evolution And Its Relevance To Fraud Prevention In The Village Government In Indonesia.</i>	Desa sebagaimana diamanatkan dalam UU No 6 Tahun 2014 diberi kewenangan untuk mengatur desa itu sendiri. Kecurangan akuntansi juga telah masuk ke dalam level desa, sehingga upaya pencegahan kecurangan akuntansi dibutuhkan, dimana terdapat hubungan antara teori kecurangan dengan praktek kecurangan akuntansi yang terjadi di desa.
7.	Alou dkk (2017)	Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, Dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Kompensasi, dan Keefektifan Pengendalian Internal secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Kecenderungan Kecurangan Akuntansi secara positif. 2. Secara parsial kesesuaian kompensasi tidak memiliki pengaruh terhadap

No	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil
		Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Konstruksi Di Manado.	<p>Kecenderungan Kecurangan Akuntansi</p> <p>3. Secara parsial moralitas manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi</p> <p>4. Secara parsial keefektifan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi</p>
8.	Indra (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.	Pengendalian intern berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>) karena t hitung > t tabel
9.	Widiautami (2017)	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal,	1. Efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan

No	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil
		<p>Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada LPD Di Kabupaten Buleleng).</p>	<p>(<i>fraud</i>) akuntansi. Nilai negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah artinya semakin tinggi efektivitas pengendalian internal maka semakin rendah kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi</p> <p>2. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). Artinya semakin taat anggota organisasi terhadap aturan akuntansi yang berlaku maka peluang untuk terjadinya <i>fraud</i> akan semakin rendah</p> <p>3. Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). Hal ini berarti semakin tinggi efektivitas pengendalian internal, semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi, dan semakin tinggi komitmen organisasi maka akan semakin rendah</p>

No	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil
			kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi
10.	Wijaya (2017)	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Dan <i>Whistleblowing</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Lpd Di Kec.Gerogak.	Efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, dan <i>whistleblowing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi .

2.4. Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Penelitian Alou dkk (2017) mengungkapkan adanya interaksi antara pengendalian internal dan moralitas individu dalam mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi. Interaksi yang dimaksud adalah apabila terdapat perubahan satu level faktor level penalaran

moralitas individu atau pada kondisi pengendalian internal, maka akan menyebabkan perubahan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi. Apabila individu memiliki level penalaran moralitas individu rendah, maka akan cenderung memanfaatkan kondisi ketika tidak terdapat elemen pengendalian internal dalam organisasi tersebut untuk kepentingan pribadinya, seperti tindakan yang berhubungan dengan kecurangan akuntansi.

Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh langsung terhadap *good governance* sehingga berimplikasi terhadap pencegahan *fraud*. Namun, sistem pengendalian internal tidak luput dari kelemahannya, kelemahan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum pelaku kecurangan, dimana seseorang berperilaku kecurangan tingkat moralitas individu yang dimiliki.

Hal tersebut tersebut sesuai dengan teori moralitas yang dijabarkan oleh Lawrence Kohlberg (1995:50) dalam tingkatan level pre-conventional, yaitu individu yang memiliki level penalaran moral rendah memiliki motivasi utama untuk kepentingan pribadinya. Sementara itu, individu dengan level penalaran tinggi dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal di organisasi tetap tidak akan melakukan kecurangan akuntansi yang tidak etis dan akan merugikan banyak pihak. Prawira dkk (2014) berpendapat bahwa moralitas individu akan mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan post-konvensional), semakin individu memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan

individunya. Dengan demikian, semakin tinggi moralitas individu, semakin ia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kondisi elemen pengendalian internal di dalam organisasi (terdapat dan tidak terdapat elemen pengendalian Internal) dapat mempengaruhi individu dengan level moral rendah untuk cenderung melakukan atau tidak melakukan kecurangan akuntansi. Sementara itu, bagi individu dengan level moral tinggi, apabila berada dalam kondisi ada maupun tidak terdapat elemen pengendalian internal organisasi, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhinya untuk melakukan kecurangan akuntansi yang akan merugikan banyak pihak.

Dalam teori atribusi, tindakan seseorang dalam organisasi dipengaruhi oleh atribut penyebab. Tindakan curang yang dilakukan seseorang, disebabkan oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Kompensasi yang sesuai diharapkan mampu mengurangi adanya keinginan untuk melakukan tindakan curang. Kecurangan akuntansi didorong oleh tindakan individu untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi termasuk melakukan kecurangan akuntansi. Menurut penelitian Radhiah (2016) sistem kompensasi memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

H₁ : Pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu secara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna.

2.4.2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001) No. 1 dalam SA seksi 319 menyatakan mengenai pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personil lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (1) keandalan Laporan Keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektifitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian internal merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan (secara memadai, bukan mutlak) tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan pengendalian internal yang efektif diharapkan pemimpin berperilaku mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan pengendalian internal yang efektif akan mencegah terjadinya kecurangan akuntansi (Dewi, 2017). Untuk meminimalisir peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan maka diperlukan pengendalian internal yang efektif.

Penelitian Widiutami dkk (2017), Alou dkk (2017), Indriastuti (2016), Indra (2017), dan Najahningrum (2013) menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan

kecurangan akuntansi. Pengendalian Internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi (Eliza, 2015). Pengaruh ini bersifat negatif artinya semakin efektif sistem pengendalian intern maka tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi semakin berkurang.

Pengendalian internal merupakan pengolahan dasar bagi perusahaan yang dapat melindungi aktiva perusahaan dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti (Muhammad dan Ridwan, 2017). Pengendalian internal akan melengkapi pengendalian eksternal yang sudah ditegakkan pemerintah, seperti melalui lembaga kepolisian, kejaksaan, pemberantas korupsi, pengawas keuangan maupun lembaga peradilan lainnya untuk meminimalisir adanya tindak kecurangan.

H₂: Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna.

2.4.3. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Kadarisman (2012: 1) dalam Alou dkk 2017 kompensasi adalah apa yang seorang karyawan/pegawai/pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya baik upah perjam ataupun gaji periodik yang didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Persepsi kesesuaian kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya yang dapat berupa gaji, upah, bonus,

insentif, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Radhiah (2016) mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi menunjukkan bahwa dengan adanya kesesuaian kompensasi yang diterima oleh karyawan, maka pegawai atau karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Dengan demikian pemberian kompensasi yang sesuai dan layak kepada karyawan akan meminimalisir terjadinya tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi di perusahaan.

Dalam penelitian Indriastuti dkk (2016), Indra (2017), dan Najahningrum (2013) menyebutkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang berarti bahwa semakin tinggi perhatian instansi akan kesesuaian kompensasi yang diterima karyawannya maka semakin rendah tingkat kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dkk (2017) kecurangan akuntansi dapat terjadi ketika seorang karyawan merasa tidak puas atas kompensasi yang ia terima dari apa yang telah mereka kerjakan. Karyawan menerima kompensasi berupa upah, gaji atau bentuk lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain, kebutuhan ekonominya. Dengan kesesuaian kompensasi yang diberikan kepada karyawannya atas apa yang telah mereka kerjakan dapat membuat karyawan tersebut merasa tercukupi sehingga tidak melakukan tindakan kecurangan akuntansi untuk

memaksimalkan keuntungan pribadinya di mana hal tersebut akan merugikan instansi itu sendiri.

H₃: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna.

2.4.4. Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

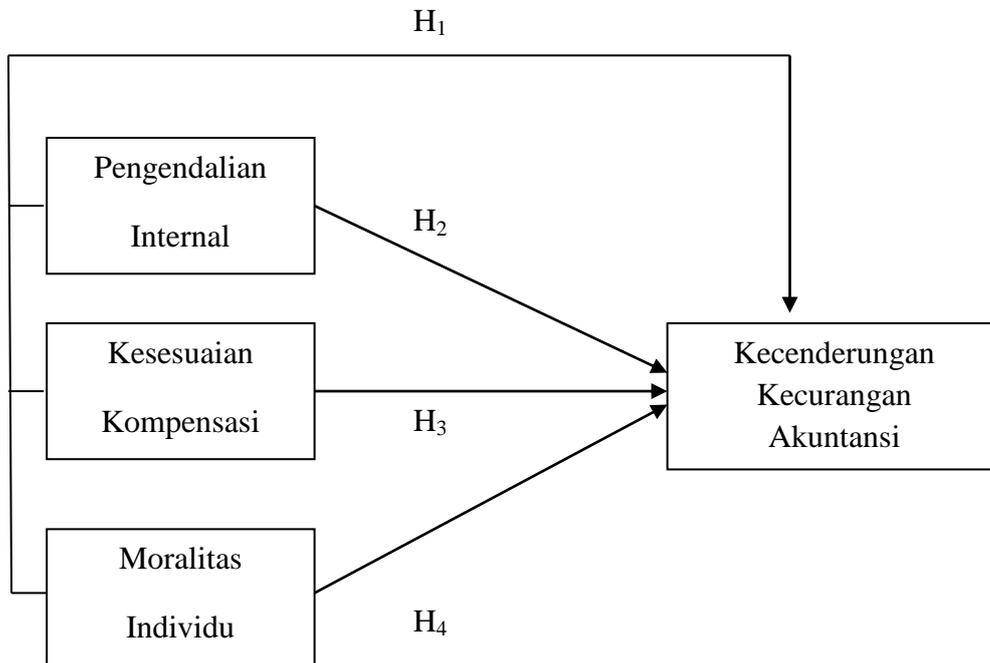
Puspasari dan Suwardi (2016) menyebutkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Dalam tindakannya, orang yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan sanksi hukum.

Hasil ini mendukung teori tahap perkembangan moral Lawrence Kohlberg (1971). Semakin tinggi tahapan Moralitas Individu, maka individu tersebut akan semakin memperhatikan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi atau organisasinya sendiri, sehingga berusaha untuk menghindarkan diri dari kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi yang merugikan banyak orang. Individu yang berada pada level moral lebih tinggi akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku, bekerja secara jujur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena individu yang memiliki tingkat moralitas tinggi akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal.

Penelitian Prawira dkk (2014) dan Wijaya dkk (2017) menyebutkan terdapat pengaruh negatif signifikan dari variabel moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal yang sama juga disebutkan dalam penelitian Indriastuti dkk (2016) dimana teori perkembangan moral berpandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai enam perkembangan yang dapat teridentifikasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian menurut Eliza (2015) yaitu moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Memiliki moral yang baik dalam bekerja berarti pegawai juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap instansi. Dengan demikian, pegawai akan cenderung bekerja dengan baik untuk kemajuan instansi tersebut. Sebaliknya, jika memiliki moral rendah, maka pegawai cenderung akan bekerja kurang baik, dan akan merasionalisasikan hal tersebut sebagai hal yang wajar dikarenakan kurangnya kepedulian akan baik buruknya hasil pekerjaan yang dilakukan, sehingga ketika pegawai tersebut melakukan kecurangan, akan dianggap sebagai hal yang biasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi moralitas individu akan semakin rendah kecenderungan kecurangan (fraud) yang mungkin terjadi.

H₄: Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian dengan variabel independen : pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu, dan variabel dependennya adalah kecenderungan kecurangan akuntansi, yang dapat digambarkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2. Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang meliputi pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna secara simultan sebesar 70,2%. Ini berarti semakin tinggi pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu maka semakin tinggi kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna.
2. Terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna secara parsial sebesar 8,4681%. Artinya semakin tinggi pengendalian internal yang dimiliki oleh perangkat desa maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna secara parsial 8,8804%. Artinya semakin tinggi kesesuaian kompensasi maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin rendah.

4. Terdapat pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa se Kecamatan Adiwerna secara parsial sebesar 4,3264% Artinya semakin tinggi moralitas individu yang dimiliki perangkat desa maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan rendah.

5.2. Saran

1. Bagi perangkat desa di Kecamatan Adiwerna

Hendaknya pemerintah desa lebih meningkatkan pengendalian internal, khususnya terkait indikator lingkungan pengendalian dan pemantauan yang masih tergolong cukup tinggi bisa menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta pemantauan yang dilakukan bukan hanya secara *top down* (atas ke bawah) namun juga secara *bottom up* (bawah ke atas) melalui proses musyawarat dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kesesuaian kompensasi untuk indikator upah dan gaji masih tergolong kedalam kategori kurang sesuai, terutama terkait keterlambatan pembayaran gaji, maka hendaknya pemerintah desa harus lebih meningkatkan efisiensi dalam proses pencairan dan pembayaran gaji perangkat desa. Indikator insentif juga masih tergolong kedalam kategori kurang sesuai, sehingga hendaknya pemerintah desa bisa lebih mengapresiasi kinerja perangkat desa. Perangkat desa juga diharapkan meningkatkan kesadaran moralitas individu masing-masing dengan menjunjung nilai kejujuran dalam bekerja

karena perangkat desa mengemban amanat dari pemerintah untuk mengelola keuangan desa agar dapat digunakan sepenuhnya dan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan masyarakat, dan berani untuk melaporkan setiap tindak kecurangan maupun indikasi kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah desa.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat sebagai bagian dari pemerintah desa yang telah terwakilkan dalam BPD (Badan Permusyawaratan Desa) diharapkan menggunakan hak politik dan hak informatifnya dengan ikut serta dalam pembahasan pengesahan APBDes, dan meminta atau mengakses data serta informasi terkait anggaran dan pembangunan desa sebagai pintu masuk bagi partisipasi warga secara aktif.

3. Bagi penelitian selanjutnya.

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbanyak variabel penelitian seperti menambahkan variabel perilaku tidak etis yang dapat dijadikan sebagai variabel interverning. Ruang lingkup sampel tidak hanya se kecamatan saja namun bias lebih luas menjadi se kabupaten. Metode pengumpulan data juga dapat diperbanyak tidak hanya kuisisioner tetapi bisa didukung dengan data-data pembukuan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Y. M., & Ikhsan, S. (2015). *Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten*. *Accounting Analysis Journal*, Volume 4 No.3. Hal 1-9 Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ahriati, D., Basuki, P., & Widiastuty, E. (2015). *Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Perilaku Tidak Etis Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur*. *Jurnal Infestasi*, Volume 11 No 1. Hal 41-55 Lombok Timur : Universitas Mataram.
- Alou, S. D., Ilat, V., & Gamaliel, H. (2017). *Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, Dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Konstruksi Di Manado*. *Jurnal Riset Going Concern*. Volume 12 No. 1. Hal 139-148 Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmadja, A. T., & Komang Adi Kurniawan Saputra. (2017). *Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, Volume 12 No.1. Hal 7-16 Bali :Universitas Pendidikan Ganesha.
- Budiantari, N. N. A., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal , Profesionalisme Badan Pengawas Dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Lpd Se-Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 8 No.2 Bali : Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dewi, C. K. R. (2017). *Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Bengkalis)*, *Jom Fekon*, Volume 4 No.1. Hal. 1443-1457 Pekanbaru : Universitas Riau.
- Eliza, Y. (2015). *Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Skpd Di Kota Padang)*. *Jurnal Akuntansi*, Volume 4 No. 1. Hal 86-100 Padang: STIE Perdagangan Padang.

- Gumilang, A. (2018). Bupati Umi Azizah Sebut Dana Desa Di Kabupaten Tegal Akan Naik. *Tribun Jateng*. Retrieved From [Http://Jateng.Tribunnews.Com/2018/12/11/Bupati-Umi-Azizah-Sebut-Dana-Desa-Di-Kabupaten-Tegal-Akan-Naik?Page=2](http://Jateng.Tribunnews.Com/2018/12/11/Bupati-Umi-Azizah-Sebut-Dana-Desa-Di-Kabupaten-Tegal-Akan-Naik?Page=2).(Diakses tanggal 25 April 2019)
- Heider, F. (1958). *Attribution Theory. A First Look At Communication Theory*.
- Icw. (2018). *Icw: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar*. *Kompas*. Retrieved From [Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/11/21/19000481/Icw-Ada-181-Kasus-Korupsi-Dana-Desa-Rugikan-Rp-406-Miliar](https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/11/21/19000481/Icw-Ada-181-Kasus-Korupsi-Dana-Desa-Rugikan-Rp-406-Miliar). (Diakses tanggal 21 Desember 2018).
- Imam Ghozali. (2013). *Analisis Multikolinearitas Spss 21*. Semarang: Bp Universitas Diponegoro.
- Indra, M. R. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. JOM Fekon*. Volume 4 No.1. Hal 468-482 Pekanbaru: Universitas Riau
- Indriastuti, D. E., Agusdin, & Animah. (2016). *Analisis Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi. Jurnal Infestasi*, Volume 12 No.2. Hal 115-130 Lombok Tengah: Universitas Mataram.
- James, K. L. (2003). *The Effects Of Internal Audit Structure On Perceived Financial Statement Fraud Prevention. Accounting Horizons*, Volume 17 No.4. Hal 315-327 Tennessee : Middle Tennessee State University.
- Kumaat, V. G. (2014). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Lawrence Kohlberg. (1995). *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lou, Y., & Wang, M. (2009). *Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assessing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting. Journal Of Business & Economics Researce*, Volume 7 No 2. Hal. 61-78 Taiwan: National Cheng Kung University .
- Malle, B. F. (2011). *Attribution Theories : How People Make Sense Of Behavior*, Hal 72–95.
- Mirinaviciene, S. (2014). *Internal Control And Fraud Prevention : Prior Research Analysis. Article Doi: [Https://Doi.Org/10.15544/Ssaf.2014.19](https://doi.org/10.15544/ssaf.2014.19)*

Elektroninio, 1(1), Hal 173–179.

- Muhammad, R., & Ridwan. (2017). *Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (Jimeka)*, Volume 2 No.4. Hal 136-145 Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Najahningrum, A. F. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi Diy*. *Accounting Analysis Journal*, Volume 2 No 3 Hal 259-267 Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Prawira, I. M. D., Herawati, N. T., & Surya, N. A. (2014). *Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng)*, *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2 No.1. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pristiyanti, I. R. (2012). *Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan*. *Accounting Analysis Journal*, Volume 1 No.1.Hal 2-14 Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Puspasari, N. (2016). *Fraud Theory Evolution And Its Relevance To Fraud Prevention In The Village Government In Indonesia **. *Asia Pasific Fraud Journal*, Volume 1 No.2. Hal 177-188 Purwokerto: University of Jenderal Sudirman.
- Puspasari, N., & Suwardi, E. (2016). *The Effect Of Individual Morality And Internal Control On The Propensity To Commit Fraud: Evidence From Local Governments*. *Journal Of Indonesian Economy And Business*, Volume 3 No.1 Hal 208-219 Purwokerto: University of Jenderal Sudirman.
- Radartegal. (2018). Diduga Selewengkan Dana Desa. Retrieved From <https://Radartegal.Com/Berita-Lokal/Diduga-Selewengkan-Dana-Desa-Sejumlah-Kades.24661.Html>
- Radhiah, T. (2016). *Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada Pt. Pos Indonesia Kcu Kota Pekanbaru)*. *Jom Fekon*, Volume 3 No. 1 Hal 1279-1293 Pekanbaru: Universitas Riau.

- Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). *Quality Of Internal Control Procedures. Managerial Auditing Journal*, Volume 23 Hal 104–124. Southport: Griffith University, Southport, Australia
- Peraturan Pemerintah RI. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2014). *Pp No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Rivai, Veithzal, & Juavani, E. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan (Vol. 7)*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Stie Ykpn.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta (Vol. 12)*.
- BPS Kabupaten Tegal (2018). *Kecamatan Adiwerna Dalam Angka 2018*.
- Tribunews. (2019). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat 89 Di Dunia Pada 2018*. Tribun.(Diakses 15 Maret 2019)
- Tuanakotta, T. M. (2014). *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (2014).
- Wahyudin, A. (2015). *Metodologi Penelitian Penelitian Bisnis & Pendidikan*. Semarang: Unnes Press.
- Widiutami, N. P. S., Sulindawati, N. L. G. E., & Atmadja, A. T. (2017). *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal , Ketaatan Aturan Akuntansi , Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng)*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 7 No.1 Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Widyaswari, D. A. N., Yuniarta, A., & Sujana, E. (2017). *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal , Kesesuaian Kompensasi , Dan Budaya Organisasi Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Susut*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 8 Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.

- Wijaya, K. D. S., Sujana, E., & Purnamawati, I. G. A. (2017). *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal , Akuntansi Pada Lpd Di Kecamatan Gerokgak. Jurusan Akuntansi Program S1*, Volume 7 No.1 Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). *Pencegahan Fraud Pada Pemerintah Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 9 No.2. Hal 331-345 ali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wilopo. (2008). *Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah Dan Perilaku Tidak Etis Birokrasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di Pemerintahan : Persepsi Auditor Badan Pemriksa Keuangan. Jurnal Ventura*, Volume 11 No.1. Surabaya: STIE Perbanas.
- Yadiati, W., & Mubarak, A. (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan Kajian Teoritis Dan Empiris*. (Kencana, Ed.). Jakarta.
- Zulkarnain, R. M. (2013). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta. Accounting Analysis Jurnal*, Volume 2 No.2 Semarang: Universitas Negeri Semarang.